

**PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN KOMPLEKSITAS DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada 33 Provinsi di Indonesia)**

Oleh :

Ajron Khusniardi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Bambang Jatmiko (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kecamatan Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2013 dan 2014. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, uji t dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki berpengaruh signifikan negatif terhadap kelemahan pengendalian intern, ukuran dan kompleksitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern, sedangkan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kualitas pengendalian intern.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, Kompleksitas Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence of economic growth, size government, local revenue, and complexity of the local government internal control weaknesses. The population in this study is the Provincial Government in Indonesia which consists of 33 provinces in 2013 and 2014. The secondary data used in this study is in the form of BPK Examination Report, Report of the Provincial Government budget realization in Indonesia year 2013 and 2014, Economic Growth, Population and the Provincial Government of the District Total in Indonesia 2013 and 2014. The hypothesis was tested by using multiple linear regression coefficient of determination, t test and F test.

The result showed that economic growth is significant negative effect on internal control weaknesses, Government size and complexity is a significant positive effect on internal control weaknesses, meanwhile local revenue did not significantly influence the internal control weaknesses. Local governments are expected to pay more attention to the quality of internal control.

Keywords : *Economic growth, Government size, Local revenue, Complexity, Internal control weaknesses*

PENDAHULUAN

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi.

Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*).

Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2006* ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangat penting. Dalam penelitian *Coe dan Curtis (1991)* menemukan dari total 127 kasus kelemahan pengendalian intern di Carolina Utara AS sebagian besar (42%) terjadi di lembaga pemerintah. Menurut *Abbot et al.* dalam *Wilopo (2006)* pengendalian intern yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan dalam organisasi. Hal ini senada dengan survey *KPMG tahun 2006* dimana sebagian besar kecurangan (38%) terdeteksi karena adanya pengendalian intern. (*Wilopo, 2006*).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Proses perencanaan pembangunan daerah perlu diimbangi oleh ketersediaan beberapa hal seperti kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Berkaitan dengan hal ini, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Pasal 56 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. Ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk membuat setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengendalian intern.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas pemerintah daerah berdasarkan jumlah PAD, jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk terhadap kelemahan sistem pengendalian intern dipemerintah daerah. Kelemahan pengendalian intern dalam penelitian ini berdasarkan hasil audit BPK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern?
4. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern?

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu tentang faktor determinan pengendalian intern banyak dilakukan di sektor swasta dan organisasi nirlaba. Penelitian tersebut yaitu Ge (2005), Doyle et al (2007), Ashbaugh-Skife et al (2007), Zhang, Niu, dan Zheng (2009), dan Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010).

Ge (2005) melakukan penelitian untuk melihat pengungkapan kelemahan material pengendalian intern setelah diterapkannya *Sarbanes-Oxley Act*. Penelitian ini menggunakan sampel 261 perusahaan yang mengungkapkan minimal satu kelemahan material pengendalian intern dalam lembar isian SEC (*security and exchange commission*) setelah tanggal efektif dari *Sarbanes-Oxley Act* tahun 2002. Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010). Berdasarkan deskripsi yang diberikan manajemen ditemukan bahwa pengendalian intern yang lemah biasanya berhubungan dengan komitmen yang kurang dalam pengendalian akuntansi. Kelemahan material pengendalian intern cenderung pula untuk berhubungan dengan kebijakan pengakuan pendapatan yang lemah, kurangnya pemisahan tanggung jawab, kekuarangan dalam proses pelaporan akhir periode dan kebijakan akuntansi, dan rekonsiliasi akun yang tidak tepat. Secara spesifik kelemahan pengendalian intern paling sering terjadi pada *current accrual account* seperti piutang dan persediaan. Selain itu kelemahan juga sering terjadi pada akun yang kompleks seperti transaksi *derivative* dan akun pajak penghasilan. Berdasarkan hasil analisis statistik peneliti menemukan bahwa kompleksitas (diukur dengan jumlah segmen operasi dan translasi mata uang asing) dan profitabilitas (dilihat dari rasio *return on assets* dan nilai *cash from operation*) berhubungan positif dengan kelemahan material pengendalian intern. Sedangkan ukuran perusahaan yang dilihat dari nilai buku perusahaan dan kapitalisasi pasar berhubungan negatif dengan kelemahan pengendalian intern.

Kemudian penelitian yang dilakukan Doyle et al (2007) ingin memeriksa faktor determinan dari kelemahan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Peneliti menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan kelemahan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) seksi 302 dan seksi 404 dari bulan Agustus 2002 sampai 2005. Dari 779 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa perusahaan yang memiliki banyak kelemahan pengendalian intern cenderung lebih kecil, lebih muda, lemah secara keuangan, kompleks, sedang tumbuh, dan dalam restrukturisasi. Kelemahan pengendalian intern tersebut bisa dibedakan menjadi perusahaan dengan masalah pengendalian perusahaan keseluruhan dan perusahaan dengan masalah pada akun tertentu (spesifik). Untuk kelemahan pengendalian intern secara keseluruhan dimiliki oleh perusahaan yang lebih kecil, lebih muda, dan lemah dalam keuangan. Sementara perusahaan yang memiliki masalah pengendalian intern pada akun spesifik adalah perusahaan yang kompleks, memiliki banyak diversifikasi, dan sedang banyak perubahan dalam operasi.

Penelitian lainnya adalah penelitian Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007). Berdasarkan SOX seksi 302 perusahaan wajib melakukan sertifikasi bahwa telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Seksi 404 mengharuskan laporan keuangan perusahaan publik dalam formulir 10-K dan 10-Q mengandung penilaian manajemen tentang efektivitas desain dan operasi pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kompleksitas organisasi (jumlah segmen usaha, penjualan dengan mata uang asing, dan jumlah persediaan) berpengaruh positif terhadap masalah pengendalian intern. Begitu juga untuk perubahan organisasi yang dilihat dari data *merger* dan akuisisi, pertumbuhan, dan restrukturisasi memiliki pengaruh positif.

Penelitian juga dilakukan pada sektor organisasi nirlaba. Penelitian yang dilakukan Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) ini ingin melihat penyebab dan dampak dari defisiensi pengendalian intern pada sektor nirlaba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27.495 lembaga amal dari tahun 1999 sampai 2007. Dari hasil pengolahan data statistik didapatkan hasil bahwa masalah pengendalian intern pada organisasi nirlaba memiliki hubungan positif dengan kondisi keuangan lemah, sedang tumbuh, lebih kompleks, dan berukuran kecil. Kondisi keuangan diukur berdasarkan keberadaan *going concern paragraph* dalam opini laporan keuangan dan surplus yang dimiliki organisasi nirlaba. Pertumbuhan dilihat dari perubahan ukuran organisasi nirlaba. Ukuran organisasi sendiri dilihat dari total aset yang dimiliki. Sedangkan kompleksitas diukur dari banyaknya jenis sumber pendapatan, dalam hal ini apakah dari pemerintah, publik dan/atau program pelayanan yang dijalankan.

Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengendalian intern

Penelitian tingkat pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan positif dengan kelemahan pengendalian intern. Selanjutnya, Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) melakukan penelitian terhadap organisasi nirlaba menyimpulkan bahwa organisasi yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan prosedur yang baru. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam organisasi.

Penelitian lainnya adalah penelitian Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007). Berdasarkan SOX seksi 302 perusahaan wajib melakukan sertifikasi bahwa telah

melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Seksi 404 mengharuskan laporan keuangan perusahaan publik dalam formulir 10-K dan 10-Q mengandung penilaian manajemen tentang efektivitas desain dan operasi pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kompleksitas organisasi (jumlah segmen usaha, penjualan dengan mata uang asing, dan jumlah persediaan) berpengaruh positif terhadap masalah pengendalian intern. Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013), Efrida (2013), Elvandhari (2013), Hartono (2014), dan Mahmud (2015). Begitu juga untuk perubahan organisasi yang dilihat dari data *merger* dan akuisisi, pertumbuhan, dan restrukturisasi memiliki pengaruh positif. Berdasarkan rerangka penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis yaitu:

Hipotesis 1: Tingkat pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern

2. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian intern

Size (Ukuran) pemerintah daerah dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada public. Kristianto (2009), Elvandhari (2013), Putri(2015), Mahmud (2015) menemukan adanya hubungan positive antara ukuran daerah terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan Martini dan Zaelani (2011), Ge dan Mc Vay (2005), Doyle et al (2007) dan Hartono (2014) yang

menemukan adanya hubungan yang negative antara ukuran perusahaan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Hipotesis 2: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

3. Pengaruh PAD dalam pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian intern.

Pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi, contohnya pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan demikian diperlukan sumber daya yang lebih untuk melakukan pengendalian terhadap jenis pendapatan ini. Dalam penelitian Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) kompleksitas diukur dari banyaknya jumlah sumber pendapatan. Hasilnya menunjukkan semakin banyak jumlah sumber pendapatan membuat masalah pengendalian intern meningkat. Nilai setiap satu sumber PAD biasanya tidak terlalu besar sehingga jika nilai total PAD besar kemungkinan berasal dari jumlah sumber PAD yang banyak. Zaelani (2011), Elvandhari (2013), dan Nurwati (2015) menemukan adanya pengaruh positif PAD terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan Puspitasari (2013) dan Hartono (2014) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan rerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat diturunkan yaitu:

Hipotesis 3: Jumlah PAD dalam pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern

4. Pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian intern.

Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Kesulitan juga akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi. Ge (2005), Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007), Doyle et al(2007), Kristianto (2009), Elvhandari (2013), Hartono (2014), Putri (2015), Mahmud (2015) menemukan hubungan positif antara jumlah segmen usaha atau cabang organisasi dengan kelemahan pengendalian intern. Dengan demikian semakin banyak segmen atau cabang organisasi kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak. Peneliti berusaha menggunakan pendekatan terhadap variabel kompleksitas dengan menggunakan jumlah kecamatan yang dimiliki pemerintah daerah. Kecamatan dalam pemerintah daerah diasosiasikan dengan jumlah segmen dalam perusahaan atau cabang dalam organisasi. Diduga banyak masalah yang timbul dari banyaknya jumlah kecamatan seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai saat pelaporan laporan keuangan. Dari uraian tersebut hipotesis yang dapat diturunkan yaitu:

Hipotesis 4: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di seluruh Indonesia (33 Provinsi). Yang mempublikasikan pertumbuhan ekonomi, laporan keuangan (pendapatan asli daerah), jumlah kecamatan dan jumlah penduduk pada tahun 2013 sampai 2014. Data

sekunder ini diperoleh dari website masing-masing daerah untuk memperoleh data ukuran pemerintah daerah,

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampling dengan ciri-ciri tertentu.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran daerah, pendapatan asli daerah dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian internal, maka bentuk persamaan regresi berganda ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kelemahan Pengendalian Intern

β_0 = Intercept persamaan Regresi

β_1 - β_4 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas.

X_1 = Pertumbuhan ekonomi

X_2 = Ukuran atau Luas wilayah daerah

X_3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_4 = Kompleksitas Daerah

ε = koefisien error (tingkat kesalahan atau tingkat gangguan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria dengan teknik *purposive sampling*, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 Provinsi. Dengan metode penggabungan data (*pooling*) maka diperoleh data penelitian sebanyak $33 \times 2 \times 5 = 330$ data observasi.

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 330 data pengamatan. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu kelemahan pengendalian intern dan empat variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), kompleksitas daerah. Statistik deskriptif menggambarkan

karakter sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	66	1,40	9,55	5,7260	1,56760
Ukuran	66	806995	45340799	7661606,306	10874411,9344
Pendapatan Asli Daerah	66	276,67	39559,41	4968,7574	7423,76118
Kompleksitas	66	44,00	664,00	213,0806	173,61738
Kelemahan Pengendalian Intern	66	17,00	422,00	139,6935	84,29157
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Hasil analisis data

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian dari masing-masing provinsi di Indonesia, dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan tahun 2013 hingga 2014, variabel kelemahan pengendalian intern memiliki nilai minimum sebesar 17 kasus dan nilai maksimum sebesar 422 kasus dengan nilai rata-rata sebesar 139,6935. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel kelemahan pengendalian intern memiliki standar deviasi sebesar 84,29157.

Nilai Minimum pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah pada tahun 2013 hingga 2014 adalah sebesar 1,40 % dan nilai maksimum sebesar 9,55 % dengan nilai rata-rata sebesar 5,7260 %. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki standar deviasi sebesar 1,566760 %.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai minimum ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 hingga 2014 adalah sebesar 806.995 dan nilai maksimum sebesar 45.340.799 dengan nilai rata-rata sebesar 7.661.605,306. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah memiliki standar deviasi sebesar 10.874.411,9344.

Nilai Minimum pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2013 hingga 2014 adalah sebesar 276,67 milyar dan nilai maksimum sebesar 39.559,41 milyar dengan nilai rata-rata sebesar 4.968,7574 milyar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel pendapatan asli daerah memiliki standar deviasi sebesar 7.423,76118 milyar.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan tahun 2013 hingga 2014, variabel kecamatan memiliki nilai minimum sebesar 44 dan nilai maksimum sebesar 664 dengan nilai rata-rata sebesar 213,0806. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel jumlah kecamatan memiliki standar deviasi sebesar 173,61738.

Untuk menguji kualitas data sebelum dilakukannya uji hipotesis maka ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah beberapa pengujian dalam asumsi klasik yang dibagi sesuai dengan jenis data dalam penelitian, diantaranya:

Tabel 4.2.

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00
	Std. Deviation	43,617
Most Extreme Differences	Absolute	
	Positive	
	Negative	
Kolmogorov-Smirnov Z		
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* dari *unstandardized residual* sebesar 0,840 yang berarti lebih besar dari α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	Pertumbuhan Ekonomi	,975
	Ukuran	,185
	Pendapatan Asli Daerah	,442
	Kompleksitas	,298

Sumber: Hasil analisis data

Hasil pengujian pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,975 > 0,1$ dan VIF $1,025 < 10$, variabel ukuran memiliki nilai *tolerance* $0,185 > 0,1$ dan VIF $5,395 < 10$, variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai *tolerance* $0,442 > 0,1$ dan VIF $2,263 < 10$, variabel kompleksitas memiliki nilai *tolerance* $0,298 > 0,1$ dan VIF $3,351 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,856 ^a	,732	,713	45,12182	1,858

Sumber: Hasil analisis data

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi karena nilai DW sebesar 1,858 berada diantara $du < dw < 4-du$ ($1,7327 < 1,858 < 2,2673$)

Tabel 4.5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
1	(Constant)	2.288
	Pertumbuhan Ekonomi	,503
	Ukuran	,027
	Pendapatan Asli Daerah	-1,467
	Kompleksitas	-1,089

Sumber: Hasil analisis data

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4.8 (Hasil Uji Nilai t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	164,926	25,007		6,595	,000
Pertumbuhan_Ekonomi	-15,889	3,732	-,295	-4,258	,000
1 Ukuran	,00006	,000	,397	2,497	,015
PAD	-,002	,001	-,197	-1,908	,061
Kompleksitas	,250	,061	,515	4,102	,000

Sumber: Hasil analisis data

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil pengujian statistik untuk Hipotesis pertama tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Kesimpulannya jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) dan Putro (2013). Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah bisa mengatur atau memanajemen pemerintah daerahnya agar mengurangi terjadinya masalah

pengendalian intern. Selain itu, juga pemerintah daerah juga memperbaiki kualitas pengendalian internnya.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil pengujian statistik untuk Hipotesis 2 sesuai dengan hipotesis yang dibuat sebelumnya. Logikanya semakin banyak jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian akan semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah yang mempunyai jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggung jawaban kepada publik.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil pengujian statistik untuk Hipotesis 3 tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasmawati dan Raharja (2012) dan Puspitasari (2013). Kristanto (2009) menyatakan bahwa yang menyebabkan tidak adanya pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern karena sejak makin maraknya penangkapan pejabat daerah akibat kasus korupsi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat PAD sebagai salah satu objek mendapat perhatian khusus (pengawasan) dalam peruntukannya dengan tujuan agar PEMDA efektif dalam melakukan kebijakan untuk kepentingan rakyat.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kompleksitas memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil pengujian statistik untuk Hipotesis 4

sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki jumlah kompleksitas lebih tinggi memiliki jumlah kasus kelemahan pengendalian intern. Jumlah kecamatan yang banyak pada setiap daerah akan sulit dalam mengimplementasikan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Puspitasari (2013).

KESIMPULAN

- 1 . Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
- 2 . Ukuran berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
- 3 . Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian pemerintah daerah.
- 4 . Kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- 1 . Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang topik ini, disarankan untuk menambah sampel penelitian lebih luas lagi sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih valid.
- 2 . Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013 hingga tahun 2014 dan data penelitian ini adalah laporan keuangan akhir tahun, data penduduk dan jumlah kecamatan berdasarkan hasil sensus dari badan pusat statistik seluruh provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Undip, Semarang.
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, Daniel W. dan Kinney, William R. (2007). *The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated Audits*. McCombs Research Paper Series No. ACC-02-05.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ihtisar Hasil pemeriksaan Tahun 2013 dan 2014*. www.bpk.go.id.
- Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press Yogyakarta.
- Christine, Shakespeare, Chaterine dan Shih. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*. Accounting Review, Jan 2010, Vol. 86 Issue 1, p325-357.
- Coe, Charles K. dan Ellis, Curtis. (1991). *Internal Controls in State, Local, and Nonprofit Agencies*. *Public Budgeting & Finance*. Malden: Vol. 11, Iss.3; pg. 43.
- Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of The Treadway Commission. (<http://www.coso.org>)
- Darwanto dan Yustikasari (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-27 Juli 2007.
- Data Jumlah Penduduk Provinsi 2014 (<http://www.bps.go.id>)
- Data Indonesian Corruption Watch (www.antikorupsi.org/)
- Data PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2013 dan 2014 (<http://www.bps.go.id>)
- Data Wilayah Ditjen PUM. (<http://www.depdagri.go.id>)
- Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. *Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting*. *Journal of Accounting End Economics*, 44, 193-223.
- Efrida. 2013. *Analisis Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan Jasa*. Jurnal Ilmiah FEB.
- Elder, Randal J et al. (2009). *Auditing dan Assurance Services An Intergated Approach. Indonesian Adaption Edition*. Singapura: Pearson Education.
- Elvandhari. 2013. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fama dan Jensen. (1983). *The separation of ownership and control*. *Journal of law and economics*, 26, pp.

- Ge, W., McVay, S. 2005. *The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control After the Sarbanes-Oxley Act*. *Accounting Horizon*, 19 (3), 137-158.
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang.
- Gozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Aceh di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.
- Hamid (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung
- Hartono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 17.
- Hasmawati dan Raharja. (2012). *Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Semarang)*. *Diponegoro Journal Of accounting*. Vol. 1, No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta*
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*(JFE), Vol 3, No. 4, 1 July 1976.
- Jhingan. 1995. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang *Good Governance*
- KPMG. (2006). *International Survey of Corporate Responsibility Reporting*. Forensic: Fraud Survey. Swiss.
- Kristanto, Septian Bayu (2009). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern*. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Volume 9, No.1
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Liana. 2011. *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Opini Oleh BPK*. Skripsi. UAJY Yogyakarta.

- Manik, Tumpal (2013). *Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Infasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. FE Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mahmud. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi. Unnes Semarang.
- Mankiw. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martani dan Zaelani (2011). *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Mustafa, Ii Baihaqi. (2004). *Pengendalian Intern dan Pemberantasan Korupsi*. Artikel Warta Pengawasan Vol.Xi.No.1/Januari 2004
- Nachrowi, D.N. dan Usman, Hardius. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknis Analisis dan Pengelolaan Data Dengan Menggunakan Paket Program Spss. PT Raja Grafindo Persada.
- Nirmala, Swastia. 2012. *Analisi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal*. Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang
- Nurwati. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Solo.
- Petrovits, Christine , Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*.
- Putri. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi. Unnes Semarang.
- Putro (2013). *Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Puspitasari, Titus. 2013. *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rudi Hartono, Amir Mahmud. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. SNA 17. Lombok.

- Rustiadi, Ernan; Saefulhakim, Sunsun dan Dyah R. Panuju, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Saptaria, Sagita (2010). Pengaruh Kualitas Komite Audit dan Independensi Auditor Eksternal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Sembiring (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja*.
- Sirojuzilam dan Mahalli. 2010. *Regional, Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan.
- Tim Penyusun. Abstraksi PP 60 Tahun 2008. Jakarta: BPKP.
- Todaro. 2000. *Economic Development*. New York University. America
- Tricker (1984). *Management Information and Control Systems*. America
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Utama, Prima Wardoyo Putro. 2013. *Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Wilopo (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposiun Nasional Akuntansi 9, Padang.
- United States General Accounting Office (GAO).(1999). Standards for Internal Control in the Federal Government*.
- Yani, Ahmad (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Skripsi FE UI. Jakarta
- Zaelani. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Komplexitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah..* Simposium Nasional Akuntansi.
- Zhang , Dong xiao Niu, dan Hong tao Zheng. (2009). *Research on the determinants of the quality of internal control: evidence from China*. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering Paper